

ANALISIS FAKTOR ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN PRINGSEWU

ANALYSIS OF AGRICULTURAL LAND CONVERSION FACTORS IN PRINGSEWU REGENCY

RARA SUKMA^{1*}, WAN ABBAS ZAKARIA², MUHAMMAD IRFAN AFFANDI²

¹Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Program Pascasarjana, Universitas Lampung

²Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung

*E-mail: rara.sukma@gmail.com

ABSTRAK

Kabupaten Pringsewu pada lima tahun terakhir mengalami alih fungsi lahan pertanian sebesar 2.931 hektare. Hal tersebut menjadikan Kabupaten Pringsewu dihadapkan pada dua kondisi yaitu mempertahankan lahan pertanian sebagai kawasan ketahanan pangan dan menyediakan lahan untuk kebutuhan akan tempat tinggal seiring dengan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Pringsewu. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan analisis IFAS-EFAS. Penelitian dilakukan dengan sasaran pemangku kebijakan, perwakilan masyarakat dari kelompok tani, dan juga akademisi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal, yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Pringsewu. Alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Pringsewu didominasi oleh faktor kelemahan sebagai faktor internal dan faktor ancaman sebagai faktor eksternal. Faktor internal yang paling mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Pringsewu adalah belum terdapatnya peta lokasi yang menunjukkan lahan sawah yang ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui kebijakan yang merupakan faktor kelemahan. Faktor eksternal yang paling berpengaruh terhadap alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Pringsewu adalah faktor ancaman yaitu posisi sawah yang strategis dekat dengan kegiatan perdagangan dan jasa yang dianggap lebih menguntungnya. Berdasarkan hasil penelitian maka didapatkan strategi yang dianggap paling tepat dalam strategi terkait alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Pringsewu mengutamakan penetrasi pasar dan pengembangan produk. Terdapat 12 faktor internal dan 9 faktor eksternal yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Pringsewu.

Kata Kunci: alih fungsi, faktor eksternal, faktor internal, lahan, pertanian

ABSTRACT

In the last five years, Pringsewu Regency has experienced conversion of 2,931 hectares of agricultural land. This makes Pringsewu Regency face two conditions: maintaining agricultural land as a food security area and providing land for housing needs in line with population growth in Pringsewu Regency. This research aims to identify and analyze factors that influence changes in agricultural land conversion in Pringsewu Regency. The method used is a descriptive analysis using IFAS-EFAS analysis. The research targeted policy makers, community representatives from farmer groups, and academics. The research results show that there are several factors, both internal and external factors, that influence the conversion of agricultural land in Pringsewu Regency. The conversion of agricultural land in Pringsewu Regency is dominated by weaknesses as internal factors and threat factors as external factors. The internal factor that most influences the conversion of agricultural land in Pringsewu Regency is the absence of a location map showing rice fields designated as sustainable food agricultural land through policy, which is a weakness factor. The external factor that has the most influence on the conversion of agricultural land in Pringsewu Regency is the threat factor, namely the strategic position of rice fields close to trade and service activities which are considered more profitable. Based on the research results, it was found that the strategy considered the most appropriate in the strategy related to the conversion of agricultural land in Pringsewu Regency prioritizes market penetration and product

development. There are 12 internal factors and 9 external factors that influence the conversion of agricultural land in Pringsewu Regency.

Keywords: *function change, external factors, internal factors, land, agriculture*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2021 penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana struktur ruang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana, sedangkan rencana pola ruang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Salah satu kawasan yang termasuk dalam rencana pola ruang kabupaten adalah kawasan tanaman pangan yang merupakan bagian dari kawasan pertanian, dimana kawasan tanaman pangan yang dimaksud adalah lahan pertanian atau sawah.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi lahan bukan pertanian. Alih fungsi lahan pertanian ini terjadi mayoritas karena pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal (Prasada & Priyanto, 2019), dimana kebutuhan akan tempat tinggal berkaitan erat dengan bertambahnya jumlah penduduk pada suatu wilayah. Pertumbuhan penduduk di sisi lain juga perlu memperhatikan bertambahnya kebutuhan pangan yang harus dipenuhi,

dimana juga perlu diperhatikan untuk mempertahankan lahan pertanian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan tersebut. Alih fungsi lahan pertanian selama ini kurang diimbangi oleh upaya terpadu mengembangkan atau mempertahankan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial maupun melakukan pengamanan alih fungsi lahan pertanian.

Alih fungsi lahan pertanian juga menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Kecilnya luas garapan petani juga disebabkan oleh peningkatan jumlah rumah tangga petani yang tidak sebanding dengan luas lahan yang diusahakan. Perencanaan yang tidak tepat juga menjadi salah satu alasan terjadinya pengurangan luasan lahan pertanian yang tidak terkontrol (Prasada & Priyanto, 2019).

Fenomena alih fungsi lahan pertanian terjadi di seluruh wilayah di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Alih fungsi lahan pertanian masih masif dan tidak terkontrol diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi dan penambahan penduduk suatu wilayah yang

dapat terlihat dari peningkatan permintaan kebutuhan penggunaan lahan yang menyebabkan pertumbuhan aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam serta adanya sektor pembangunan primer yang mengalami pergeseran dari faktor pertanian ke sektor manufaktur dan jasa (Handari, 2012).

Terdapat permasalahan dalam mengendalikan alih fungsi lahan sawah yaitu kebijakan mengenai perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang masih belum bisa diimplementasikan (Pitaloka, 2020; Wicaksono, 2020). Laju perubahan alih fungsi lahan sawah akan mengancam ketahanan pangan dan juga mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan berupa lahan kritis, erosi tanah, sedimentasi yang meningkat, serta meningkatnya kemungkinan terjadi banjir pada musim hujan dan kekeringan di musim kemarau (Handari, 2012).

Beberapa penelitian terkait alih fungsi lahan pertanian antara lain adalah adanya kendala kebijakan yang tidak memperbolehkan alih fungsi lahan tidak memperhatikan kebijakan pertumbuhan industri yang secara tidak langsung justru mendorong alih fungsi lahan sawah (Handari, 2012). Selain adanya pertumbuhan industri terdapat juga inkonsistensi kebijakan dengan adanya

pemberian izin lokasi pada lahan sawah beririgasi teknis untuk dialihkan menjadi lahan bukan pertanian (Nasoetion, 2003). Hal tersebut sejalan dengan hasil dari beberapa penelitian lain yang menyatakan pentingnya pedoman spasial yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mengendalikan alih fungsi lahan pertanian (Fahmi, 2010; Handari, 2012; Iskandar dkk., 2016; Mujiono & Fitria, 2019; Pitaloka, 2020; Sakti dkk., 2013; Wicaksono, 2020; Wulandari & Rahman, 2017).

Perkembangan wilayah di Kabupaten Pringsewu ditandai dengan adanya pembangunan di berbagai sektor yang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian yang masif dan tidak terkontrol sehingga mengancam pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Kabupaten Pringsewu dengan luas wilayah kurang lebih sebesar 61.719 hektare memiliki luas lahan pertanian sebesar kurang lebih 22% dari total luas wilayah kabupaten yang menjadikan Kabupaten Pringsewu ditetapkan menjadi kawasan ketahanan pangan oleh Provinsi Lampung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Kabupaten Pringsewu memiliki luas lahan pertanian kurang lebih sebesar 24.889 hektare pada tahun 2017 menjadi 23.613 hektare pada tahun 2020, dimana data lahan

pertanian pada Badan Pusat Statistik tersebut terdiri dari lahan sawah, baik irigasi dan tadah hujan, serta lahan bukan sawah berupa tegal, ladang, perkebunan, tambak, kolam/empang, dan lainnya. Luas

lahan pertanian dalam rentang waktu sepuluh tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 dapat diamati pada Tabel 1.

Tabel 1. Perubahan Luas Lahan Pertanian dan Lahan Bukan Pertanian Kabupaten Pringsewu Tahun 2010–2020 (dalam Ha)

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Lahan Pertanian	49.391	49.391	46.889	46.689	46.894	45.778	45.778	24.889	26.669	23.858	23.613
Lahan Sawah	13.534	13.534	13.528	13.328	13.528	13.528	13.528	13.528	13.678	13.678	13.678
Irigasi (irigasi teknis; irigasi setengah teknis; irigasi sederhana; irigasi desa)	8.766	8.766	9.646	9.897	9.646	8.676	8.676	9.036	8.801	9.366	9.932
Tadah Hujan	4.768	4.768	3.882	3.431	3.882	4.852	4.852	4.492	4.877	4.312	3.746
Lahan Bukan Pertanian (rumah, bangunan dan halaman; hutan negara; rawa-rawa; lainnya)	35.857	35.857	33.361	33.361	33.366	32.250	32.250	11.361	12.991	10.810	9.935
Lahan Bukan Pertanian (rumah, bangunan dan halaman; hutan negara; rawa-rawa; lainnya)	15.534	15.534	14.159	14.159	15.606	16.722	16.722	37.611	35.831	38.642	38.887

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu

Tabel 1 memperlihatkan terjadinya penambahan luasan lahan bukan pertanian sebagaimana terjadi penurunan luasan lahan pertanian. Di samping itu, terdapat perbedaan luasan lahan pertanian jika dibandingkan dengan data spasial yang terdapat pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu. Berdasarkan data

spasial tersebut pada tahun 2017 Kabupaten Pringsewu memiliki luas lahan pertanian kurang lebih sebesar 15.338 hektare, sedangkan pada tahun 2023 memiliki luas lahan pertanian kurang lebih sebesar 13.740 hektare. Terdapat persamaan dari pernyataan data tersebut diatas yaitu terjadi pengurangan luasan lahan pertanian di

Kabupaten Pringsewu akibat terjadinya alih fungsi lahan pertanian.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Pringsewu.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Pringsewu secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu wilayah yang terdapat di Provinsi Lampung yang ditetapkan menjadi *mandatory* ketahanan pangan. Pengambilan data dilakukan pada November 2022– Januari 2023.

Sasaran dan Responden Penelitian

Sasaran dari penelitian ini adalah pemangku kebijakan, perwakilan masyarakat dari kelompok tani dan akademisi berjumlah tujuh orang. Penentuan responden berjumlah 7 orang, dengan anggapan dapat mewakili untuk menjawab kebutuhan data yang diperlukan, dimana berdasarkan pertimbangan pakar yaitu keberadaan atau keterjangkauan, serta reputasi dan kredibilitas. Jumlah pakar

sebanyak 3 sampai dengan 6 atau 7 dianggap cukup memiliki tingkat presisi yang tinggi (Hora, 2004).

Penentuan responden pada penelitian ini didasarkan pada beberapa kriteria yaitu:

1. Responden merupakan pengguna atau pemilik lahan pertanian;
2. Responden memiliki aktivitas terkait penetapan kebijakan aiih fungsi lahan pertanian;
3. Responden memiliki kompetensi terkait kebijakan alih fungsi lahan pertanian;
4. Responden merupakan pengambil kebijakan dengan masa jabatan minimal satu tahun.

Berdasarkan kriteria tersebut maka ditentukan responden pada penelitian ini berasal dari perangkat daerah yang terdapat di Kabupaten Pringsewu berjumlah 5 orang, yang terdiri dari 1 orang responden dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2 orang responden dari Dinas Pertanian, dan 2 orang responden dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Responden lainnya yaitu 1 orang berasal dari kelompok tani yang merupakan perwakilan masyarakat, dan 1 orang dari akademisi.

Metode Analisis Data

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menggunakan metode analisis deksriptif dengan menggunakan analisis IFAS-EFAS. Analisis IFAS-EFAS

dilakukan dengan menggunakan matriks dari hasil pengelompokan beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Matriks IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*) adalah alat analisis yang menampilkan kondisi internal untuk menunjukkan faktor kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, sedangkan matriks EFAS (*External Factor Analysis Summary*) merupakan alat analisis yang menampilkan kondisi eksternal yang dapat menunjukkan faktor peluang dan ancaman yang dimiliki.

Penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Pringsewu. Faktor-faktor tersebut kemudian dikelompokkan menjadi faktor internal berupa faktor kekuatan dan faktor kelemahan, serta faktor eksternal berupa faktor peluang dan faktor ancaman. Selanjutnya dilakukan pembobotan skor keterkaitan antar masing-masing faktor internal maupun eksternal tersebut, kemudian pada masing-masing faktor diberikan rating antara 1 sampai dengan 4 dengan dasar tingkat efektivitas strategi dengan rentang rating yaitu nilai 1 untuk kondisi faktor dibawah rata-rata, nilai 2 jika rata-rata, nilai 3 apabila kondisinya diatas rata-rata, dan nilai 4 untuk sangat bagus. Langkah selanjutnya adalah mengalikan bobot dengan rating sehingga didapatkan

skor pada masing-masing faktor yang menunjukkan faktor yang paling berpengaruh baik faktor internal maupun faktor eksternal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat permasalahan-permasalahan terkait dengan alih fungsi lahan pertanian yang dapat disimpulkan berdasarkan penelitian sebelumnya antara lain adanya perencanaan yang belum konsisten dan terintegrasi dimana Pemerintah berupaya melarang terjadinya alih fungsi namun disisi lain justru membuat kebijakan pertumbuhan industri maupun manufaktur dan sektor non pertanian lain yang secara tidak langsung mendorong alih fungsi lahan pertanian (Handari, 2012; Nasoetion, 2003). Selain itu, sudah terdapat komitmen dari Pemerintah untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian dengan menerbitkan kebijakan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, namun pada kebijakan tersebut tidak tersedia peta kawasan atau lokasi yang ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sehingga kebijakan menjadi sulit diimplementasikan (Fahmi, 2010; Hatmanto & Setyono, 2018; Mujiono & Fitria, 2019; Nasoetion, 2003; Sakti dkk., 2013; Wicaksono, 2020).

Permasalahan lain terkait alih fungsi lahan pertanian adalah belum adanya jaminan ketersediaan air irigasi yang menyebabkan petani kekurangan air ditambah adanya desakan ekonomi karena harga jual tanah yang tinggi menjadi alasan pemilik lahan untuk menjual dibandingkan dengan menggarap sawah (Fahmi, 2010; Nasoetion, 2003; Wicaksono, 2020).

Beberapa temuan permasalahan berdasarkan penelitian sebelumnya ditriangulasikan dengan hasil wawancara responden penelitian maka didapatkan beberapa faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Pringsewu. Selanjutnya faktor-faktor tersebut dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal terdiri dari faktor kekuatan dan faktor kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri dari

faktor peluang dan faktor ancaman. Setelah dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal, selanjutnya diberikan skor keterkaitan antarfaktor dengan skor nilai 0 yang berarti tidak ada keterkaitan, nilai 1 berarti keterkaitan lemah, dan nilai 2 yang berarti keterkaitan kuat.

Setelah diberikan skor keterkaitan antarfaktor kemudian dihitung bobot masing-masing faktor dalam rangka mempertajam analisis strategi yang akan diterapkan, selanjutnya dilakukan pemberian *rating* dan setelah itu mengalikan bobot dengan *rating* sehingga didapatkan skor pada masing-masing faktor yang menunjukkan faktor yang paling berpengaruh baik faktor internal maupun faktor eksternal sehingga didapatkan hasil yang dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 2. Matriks IFAS Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Pringsewu

No.	Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor	Ranking
<i>Kekuatan (Strength)</i>					
1	Wilayah yang strategis mempermudah akses pembangunan infrastruktur penunjang pertanian dan distribusi pupuk	0,1042	3	0,3126	1
2	Sudah ada komitmen dari Pemerintah Kabupaten untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian melalui kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	0,1026	2	0,2052	2
3	Mayoritas kepemilikan lahan merupakan masyarakat Pringsewu sehingga akan mempermudah Pemda untuk melakukan sosialisasi Perda	0,0655	2	0,1309	4

4	Sudah terjalin koordinasi antar perangkat daerah yang berkewenangan terkait dengan alih fungsi lahan pertanian	0,0901	2	0,1801	3
<i>Kelemahan (Weakness)</i>					
1	Masih terdapat lahan sawah yang belum terdukung infrastruktur irigasi	0,0831	4	0,3323	3
2	Masih belum terpenuhinya kebutuhan air irigasi yang terlihat dari mayoritas pola tanam yang hanya sekali tanam	0,0861	4	0,3443	2
3	Belum terdapat peta lokasi lahan sawah yang ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	0,0900	4	0,3602	1
4	Perencanaan yang belum terintegrasi dimana dalam RTRW tidak menyebutkan luasan maupun peta lahan pertanian pangan berkelanjutan	0,0801	4	0,3205	4
5	Kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan belum tersosialisasikan optimal kepada masyarakat karena tidak terdapat pedoman spasial di dalam kebijakan tersebut	0,1002	3	0,3005	5
6	Terjadinya konversi lahan sawah akibat pajak yang tinggi	0,0600	2	0,1200	7
7	Keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten untuk pemberian kompensasi lahan yang ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan	0,0874	2	0,1749	6
8	Kurangnya sumberdaya manusia di Pemerintah Kabupaten yang memiliki kemampuan untuk melakukan pemetaan lahan sawah	0,0507	2	0,1014	8
Total Nilai IFAS		1,000		2,8830	

Sumber: Data diolah (2023)

Tabel 3. Matriks EFAS Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Pringsewu

No.	Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Skor	Ranking
<i>Peluang (Opportunity)</i>					
1	Terdapat program bantuan benih sebagai upaya mempertahankan lahan sawah	0,1062	2	0,2123	2
2	Terdapat Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk petani	0,0859	2	0,1717	3
3	Asumsi masyarakat dalam penentuan status sosial berdasarkan luas lahan sawah yang dimiliki	0,1122	2	0,2243	1
<i>Ancaman (Threat)</i>					
1	Belum terdapat petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) strategi pemberlakuan insentif-disinsentif dari Kementerian terkait pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	0,0855	3	0,2565	5

2	Tingginya pertumbuhan penduduk sehingga membutuhkan lahan untuk tempat tinggal	0,0889	4	0,3556	4
3	Terdapat perilaku petani yang enggan menggarap sawah	0,1270	3	0,3811	2
4	Posisi sawah yang strategis dekat dengan kegiatan perdagangan dan jasa yang dianggap lebih menguntungkan menjadikan lahan sawah rentan alih fungsi	0,1483	4	0,5930	1
5	Pemecahan lahan sawah karena waris menyebabkan menyempitnya kepemilikan lahan sawah sehingga rawan alih fungsi	0,1254	2	0,2507	6
6	Kurangnya pemahaman masyarakat pentingnya mempertahankan lahan sawah yang sudah ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan	0,1208	3	0,3623	3
Total Nilai EFAS		1,000		2,8076	

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan hasil perkalian bobot dengan *rating* didapatkan skor pada masing-masing faktor baik internal maupun eksternal. Berdasarkan tabel matriks analisis IFAS-EFAS dapat diidentifikasi ranking faktor internal yang menjadi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) maupun ranking faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) dalam rangka implementasi kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Pringsewu.

Faktor kestrategisan wilayah menjadi faktor kekuatan yang paling tinggi dengan skor prosentase sebesar 31,26% dengan asumsi wilayah yang strategis dapat mempermudah akses pembangunan infrastruktur penunjang pertanian dan distribusi pupuk, yang diikuti oleh faktor

komitmen Pemda untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian melalui kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan skor prosentase sebesar 20,52%. Faktor kelemahan yang paling tinggi adalah belum terdapat peta lokasi lahan sawah yang ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan skor prosentase sebesar 36,02%. Faktor kelemahan tertinggi kedua dengan skor prosentase sebesar 34,43% adalah belum terpenuhinya kebutuhan air irigasi yang dapat terlihat dari mayoritas pola tanam pada yang hanya sekali masa tanam.

Faktor peluang dengan skor prosentase paling tinggi adalah faktor asumsi masyarakat terhadap penentuan

status sosial berdasarkan luasan lahan sawah yang dimiliki sebesar 22,43% memberikan peluang dalam mempertahankan alih fungsi lahan sawah. Faktor program bantuan benih menjadi faktor peluang tertinggi kedua dengan skor prosentase sebesar 21,23%. Faktor posisi sawah yang strategis dekat dengan kegiatan perdagangan dan jasa sehingga rentan alih fungsi menjadi faktor ancaman tertinggi dengan skor prosentase sebesar 59,30%, sementara faktor perilaku petani yang enggan menggarap sawah juga menjadi faktor ancaman tertinggi kedua dalam implementasi kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan skor prosentase sebesar 38,11%.

Dari hasil analisis matriks IFAS-EFAS dapat dilihat skor faktor internal yang paling tinggi adalah justru faktor kelemahan dibandingkan dengan faktor kekuatan, sedangkan faktor eksternal yang mempunyai skor paling tinggi adalah faktor ancaman daripada faktor peluang. Dalam menentukan strategi terkait alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Pringsewu dapat dilihat dari hasil pembobotan faktor-faktor berupa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman tersebut. Dengan kata lain, pada penentuan strategi terkait alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Pringsewu perlu lebih memperhatikan

faktor kelemahan berupa ketersediaan peta lokasi lahan sawah yang ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan faktor ancaman yaitu perilaku petani yang enggan menggarap sawah.

Hasil matriks analisis IFAS-EFAS pada Tabel 2 dan Tabel 3 dipetakan dalam matriks I-E dimana total nilai IFAS merupakan angka pada sumbu X sedangkan total nilai EFAS merupakan angka pada sumbu Y. Hasil pembobotan dari faktor internal dan faktor eksternal dapat dilihat pada Tabel 4, sedangkan penggambaran skor faktor internal dan faktor eksternal tersebut pada matriks I-E dapat dilihat pada Gambar 1.

Tabel 4. Pembobotan Faktor Internal dan Faktor Eksternal

Kekuatan (<i>Strenght</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)	Jumlah
0,8289	2,0541	2,8830
Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Threat</i>)	
0,6083	2,1993	2,8076

Sumber: Data diolah (2023)

Total Skor EFAS	Total Skor IFAS		
	Kuat 3,0-4,0	Sedang 2,0-2,99	Lemah 1,0-1,99
Tinggi 3,0-4,0	I (growth and built)	II (growth and built)	III (hold and maintain)
Sedang 2,0-2,99	IV (growth and built)	V (hold and maintain)	VI (harvest and divest)
Rendah 1,0-1,99	VII (hold and maintain)	VII (harvest and divest)	IX (harvest and divest)

Gambar 1. Matriks I-E Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Pringsewu

Berdasarkan Gambar 1, hasil matriks pembobotan faktor internal dan eksternal sebagaimana terdapat pada sel V yang berarti diperlukan penerapan strategi pertahankan dan pelihara (*hold and mantain*) yaitu strategi dengan penetrasi pasar dan pengembangan produk, sehingga strategi yang dianggap paling tepat terkait alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Pringsewu mengutamakan penetrasi pasar dan pengembangan produk. Hal tersebut mengindikasikan perlunya perhatian dalam peningkatan produk pertanian yang merupakan strategi yang perlu diperhatikan terkait dengan faktor-faktor internal maupun eksternal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Terdapat total 21 faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian

di Kabupaten Pringsewu. Faktor-faktor tersebut terdiri dari 12 faktor internal yang meliputi faktor kekuatan dan faktor kelemahan, serta 9 faktor eksternal yang meliputi faktor peluang dan faktor ancaman. Faktor internal yang paling berpengaruh terhadap alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Pringsewu didominasi oleh faktor kelemahan yaitu belum terdapatnya peta lokasi lahan sawah yang ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, belum terpenuhinya kebutuhan air irigasi yang dapat terlihat dari mayoritas pola tanam pada yang hanya sekali masa tanam, dan masih terdapatnya lahan sawah yang belum didukung infrastruktur irigasi.

Sementara itu, faktor eksternal yang paling berpengaruh terhadap alih fungsi lahan pertanian adalah faktor ancaman yaitu posisi sawah yang strategis dekat dengan kegiatan perdagangan dan jasa yang dianggap lebih menguntungkan menjadikan lahan sawah menjadi rentan alih fungsi. Selain itu, terdapat perilaku petani yang enggan menggarap sawah, serta kurangnya pemahaman masyarakat pentingnya mempertahankan lahan sawah yang sudah ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, beberapa saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pringsewu adalah agar dapat melakukan pemetaan lokasi lahan sawah, memenuhi kebutuhan air irigasi, mengembangkan infrastruktur irigasi, mengembangkan pasar dan jasa pertanian, meningkatkan kesadaran petani, mengantisipasi perubahan perilaku petani, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait alih fungsi lahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, M. A. (2010). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam Program Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan pada Kawasan Pangan. *Skripsi*, 15(1), 156–179.
<http://epa.sagepub.com/content/15/2/129.short%0Ahttp://joi.jlc.jst.go.jp/JST.Journalarchive/materia1994/46.171?from=CrossRef>
- Handari, A. W. (2012). Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Magelang. *Tesis*.
- Hatmanto, T., & Setyono, J. S. (2018). Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui Penggunaan Peta Spasial Studi Kasus di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. *Seminar Nasional Geomatika*, 3, 735.
<https://doi.org/10.24895/sng.2018.3-0.1032>
- Iskandar, I., Miftah, H., & Yusdiarti, A. (2016). Implementasi Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Garut Jawa Barat (Kasus di Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut). *Jurnal Agribisains*, 2(2), 11–21.
<https://doi.org/10.30997/jagi.v2i2.775>
- Mahfud, T., & Mulyani, Y. (2017). Aplikasi Metode QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix). *Jurnal Sosiasl Humanioradan Pendidikan*, 1(1), 66–76.
- Mujiono, & Fitria, I. (2019). Model Spasial Perubahan Lahan Sawah Untuk Mendukung Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Di Kabupaten Seluma. *Agrotrop : Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian (Journal of Agricultural Science)*, 17(1), 113.
<https://doi.org/10.32528/agrotrop.v17i1.2193>
- Nasoetion, L. I. (2003). Konversi Lahan Pertanian: Aspek Hukum dan Implementasinya Agricultural Land Conversion: Judicial Aspect and. *Prosiding Seminar Nasional Multifungsi Dan Konversi Lahan Pertanian*, 41–55.
- Pitaloka, E. D. A. (2020). Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Dimensi Politik Hukum Penataan Ruang. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(1), 49.
<https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.718>
- Prasada, I. M. Y., & Priyanto, M. W. (2019). Dampak Implementasi Perda Perlindungan Lahan. *Agritech*, XXII(2), 140–154.
<http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/AGRITECH/article/view/4252/2955>
- Sakti, M. A., Sunarminto, B. H., Maas, A.,

- Intradewa, D., & Kertonegoro, B. D. (2013). Kajian Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Purworejo. *Jurnal Ilmu Tanah Dan Agroklimatologi*, 10(c), 2–6.
- Siroj, M. Z., & Lukmandono, L. (2021). Analisis SWOT dan QSPM untuk Meningkatkan Kinerja SDM di PT. Elang Jagad Sidoarjo. *Prosiding SENASTITAN: Seminar ...*, 170–175. <https://ejournal.itats.ac.id/senastitan/article/view/1621>
- Wicaksono, A. (2020). Implementasi Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Karawang: Studi Kasus Penetapan Luas Baku Sawah. *Jejaring Administrasi Publik*, 12(9), 89–107.
- Wulandari, D. A., & Rahman, A. Z. (2017). Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Tegal (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun (2012-2032). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.